

ABREVIASI BAHASA LOKAL PADA PENAMAAN APLIKASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR

¹Muh. Wira Mattalitti ²Sudarmono, S.STP., M.Si., Ph.D.
¹NPP. 31.0833

¹Asal Pendaftaran Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: wirmatt@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The practice of naming applications using local language abbreviations has become a common phenomenon across many local governments throughout Indonesia. The study is motivated by several factors. First, despite existing literature, there is a lack of specific research focusing on this particular locus and its implications. Second, the impact of this innovation on the implementation of the Electronic Government System (SPBE) remains incompletely understood. Third, there is currently no policy specifically addressing the practice of application naming using local language abbreviations. **Purpose:** This research aims to investigate the adoption stages of local language abbreviations in application naming within the context of the Communication and Information Agency (Diskominfo) in Makassar City. **Method:** The research employs a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through interviews, observations, and documentation. Data analysis follows an interactive data analysis technique, including data reduction, presentation, and conclusion drawing. **Result:** The findings reveal that, overall, this innovation did not progress through the adoption stages perfectly, despite its adoption by Diskominfo Kota Makassar. **Conclusion:** In summary, the innovation faced challenges during the knowledge stage, where a lack of understanding led to misaligned application execution. The implementation stage was not fully optimized, as some applications still lacked local language abbreviations, affecting the confirmation process and rendering it context-dependent.

Keywords: Local Language Abbreviations, Naming Application, Diskominfo Kota Makassar

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penamaan aplikasi menggunakan abreviasi bahasa lokal telah menjadi fenomena umum pada banyak pemerintah daerah diseluruh Indonesia. Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan karena pertama, dari hasil kajian literatur belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas lokus dan fokus ini. Kedua, implikasinya terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya dipahami. Ketiga, belum adanya kebijakan mengenai praktik penamaan aplikasi khususnya menggunakan abreviasi bahasa lokal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi tahapan adopsi inovasi abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, inovasi ini tidak melalui tahapan adopsi inovasi dengan sempurna meski inovasi ini telah diadopsi oleh Diskominfo Kota Makassar. **Kesimpulan:** Inovasi ini gagal pada tahap knowledge dimana kurangnya pemahaman membuat eksekusi nama aplikasi jadi tidak sesuai dengan konteksnya. Tahap implementasi juga belum maksimal karena masih adanya aplikasi yang tidak dinamai menggunakan abreviasi bahasa lokal sehingga memengaruhi hasil dari tahap konfirmasi dan membuatnya bersifat fleksibel tergantung kondisi dilapangan.

Kata Kunci: Abreviasi Bahasa Lokal, Penamaan Aplikasi, Diskominfo Kota Makassar.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika perjalanan praktek pemerintahan yang senantiasa berhadapan dengan lingkungan dan harapan masyarakat menjadi pendorong berubahnya paradigma pemerintahan secara konseptual. Indonesia telah mengambil langkah besar dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya transformasi digital nasional. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada hakikatnya merupakan digitalisasi pemerintahan yang memanfaatkan gelombang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik kepada aparatur sipil negara, instansi pemerintah itu sendiri, pelaku bisnis, dan masyarakat. SPBE bertujuan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel melalui pendekatan teknologi demi pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya (Ahad & Adhityo, 2023). Sejak 2018, Indonesia telah meluncurkan kebijakan mengenai SPBE yang bertujuan untuk mendorong transformasi digital di-bidang pemerintahan. Namun, implementasi SPBE di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan akses internet yang masih terbatas di beberapa daerah di Indonesia (Amalia, 2019).

Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi tantangan tersebut dan mempercepat transformasi digital di bidang pemerintahan. Beberapa manfaat dari implementasi SPBE di Indonesia adalah mempercepat proses administrasi pemerintahan, menekan biaya operasional pemerintah, dan memperkuat kolaborasi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan urusan dan tugas pemerintah. SPBE secara sederhana bertujuan untuk mendorong transformasi digital di-bidang pemerintahan, mempercepat proses administrasi pemerintahan, dan meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas (Wahyuni, 2023). SPBE dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Rizkinaswara, 2020). Sejak diperkenalkannya Perpres No. 95 Tahun 2018, SPBE telah menjadi inisiatif penting dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas. Berbagai program dan kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa inovasi aplikasi yang dihadirkan semakin berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya proposal inovasi yang diajukan oleh berbagai instansi dari seluruh pemerintah daerah pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang membuktikan bahwa pemerintah daerah melihat ini sebagai sesuatu yang perlu diberi perhatian lebih (KemenPANRB, 2023)

Berbagai program dan kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa inovasi aplikasi yang dihadirkan semakin berkualitas (Fernandes, 2017). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya proposal inovasi yang diajukan oleh berbagai instansi dari seluruh pemerintah daerah pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang membuktikan bahwa pemerintah daerah melihat ini sebagai sesuatu yang perlu diberi perhatian lebih salah satunya melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) pada lingkungan kementerian atau lembaga setara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa gerakan wajib satu instansi satu inovasi harus dilaksanakan guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Bersamaan dengan itu tren transformasi digital dalam pelaksanaan pelayanan publik juga memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE (Anugrah et al., 2022). Berdasarkan utusan Menteri PANRB Republik Indonesia No. 108 Tahun 2023 mengenai Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah Tahun 2022, total sebanyak 34 provinsi di Indonesia telah melaksanakan SPBE (Humas MENPANRB, 2022). Hal ini terlihat dari upaya pemerintah daerah yang semakin menonjol dalam menyajikan pelayanan publik yang efektif melalui Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana disoroti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) pada tahun 2021. Oleh sebab itu transformasi digital kemudian menjadi kunci atas bergesernya paradigma pelaksanaan pemerintahan khususnya pelayanan publik di seluruh Indonesia, termasuk pemerintah daerah agar menciptakan solusi dan inovasi yang efektif sehingga kualitas inovasi aplikasi di Indonesia tidak berjalan ditempat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan inovasi aplikasi adalah dengan menggunakan pendekatan kebudayaan, seperti menggunakan abreviasi bahasa lokal yang sedang menjadi tren dan praktik umum dalam penamaan aplikasi oleh instansi pemerintahan daerah (Ragam, 2021) dimana Inovasi ini biasanya berupa pemenggalan dan penyingkatan nama (abreviasi) yang menggunakan unsur-unsur bahasa lokal sebagai elemen baru agar terlihat unik. Abreviasi itu sendiri merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau frasa. Hal ini merupakan sebuah proses morfologis serta proses pemenggalan yang akan membentuk sebuah kata baru (Kridalaksana, 2010).

1.2 Kesenjangan Masalah

Terdapat beberapa permasalahan pada inovasi menamai aplikasi menggunakan abreviasi bahasa lokal di Diskominfo Kota Makassar. Inovasi ini belum begitu jelas praktiknya karena kadang abreviasi yang digunakan masih belum sesuai dengan kaidah yang kemudian menimbulkan perbedaan makna bahkan menjadi tidak relevan dengan konteks aplikasinya. Di Kota Makassar, secara umum, penamaan pelayanan publik paling banyak menggunakan abreviasi bernuansa bahasa lokal (Tim DetikSulsel, 2022). Abreviasi bahasa lokal memang bisa menjadi strategi jitu sekaligus bentuk pengakuan terhadap kearifan lokal dan budaya daerah yang dapat meningkatkan rasa bangga dan identitas masyarakat terhadap kota mereka, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Noor et al., 2023). Namun perlu diingat kembali bahwa perkembangan peradaban masyarakat perkotaan cenderung tumbuh dari apatisisme yang menggantikan eksistensi nilai-nilai kearifan lokal sehingga sudah jarang dianggap sebagai sarana untuk membentuk karakter bermasyarakat dan penciri kebudayaan. Selain itu, heterogenitas masyarakat Kota Makassar yang berasal dari berbagai latar belakang budaya tidak serta merta mampu menerjemahkan maksud dari nama aplikasi yang menggunakan abreviasi, apalagi jika dibungkus dengan bahasa lokal sebagai daya tarik utamanya (Lan, 2017). Penamaan yang sulit dipahami tentu dapat menghambat komunikasi pada pelayanan publik yang disediakan (Ragam, 2021). Sayangnya hal ini masih jarang dibahas karena dianggap tidak begitu urgen untuk diberi perhatian lebih. Padahal, praktik ini bisa berimplikasi pada masyarakat yang akan merasa jauh dari proses pelayanan publik sehingga merasa tidak diberikan ruang untuk terlibat dan berpartisipasi pada pelaksanaan pemerintahan yang kemudian membuat langkah pemerintah Kota Makassar yang awalnya menggunakan abreviasi bahasa lokal untuk menggaet hati masyarakat, berubah menjadi tantangan baru dalam praktiknya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari temuan peneliti saat melihat fenomena penggunaan abreviasi bahasa lokal dalam penamaan aplikasi pemerintah pada banyak daerah di Indonesia. Dalam penelitian Ragam (2021) yang berjudul “Pemakaian Akronim Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya” ditemukan bahwa akronim digunakan demi kepentingan kelancaran kerja agar menjadi lebih ringkas dan membuat peristilahan kata di lingkungan kerja menjadi efektif dan mudah diingat. Selain itu akronim-akronim yang ada juga digunakan agar kosa kata pada bidang pemerintah menjadi lebih jelas, singkat, dan mudah diingat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya akronim-akronim pada lingkungan kerja yang seharusnya mempermudah untuk menjalankan tugas sehari-hari malah menjadi kendala. Selanjutnya, pada penelitian Derin et al. (2019) yang berjudul *Indonesians’ Tendency to Refer Abbreviation as Acronym: Types of Abbreviation as Word Formation Process* kemudian dijelaskan alasan mengapa orang Indonesia suka menggunakan dan membuat singkatan baik dalam suasana formal maupun informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan mengapa masyarakat Indonesia kebanyakan menyamakan singkatan dengan akronim atau seolah-olah akronim adalah istilah payung dari proses tersebut adalah karena masyarakat awam memahami bahwa akronim lebih menekankan pada kemudahan pelafalan. Praktik viral menyingkat frasa panjang dan bahkan kata tunggal bermula dari motivasi untuk menciptakan kata-kata yang mudah diucapkan. Penelitian dari Nuraeni & Tri (2017) yang berjudul “Abreviasi Dalam Menu Makanan Dan Minuman di Kota Semarang: Suatu Kajian Morfologis” menjelaskan tentang penggunaan kata yang simple atau singkat di era sekarang sangat dibutuhkan, apalagi itu mengarah pada hal yang menarik, salah satunya pada menu makanan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor kemunculan abreviasi antara lain adalah mempermudah pengucapan dan pencatatan menu, mudah diingat, simple, unik, dan kekinian. Adapun dampak negatif dari fenomena abreviasi antara lain munculnya anggapan abreviasi sebagai kosakata baru, tidak memperhatikan kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, dan abreviasi yang dipelesetkan menyebabkan terjadinya perubahan makna, dan akronim menjadi leksikon dalam bahasa Indonesia. Penelitian Budiana et al. (2020) yang berjudul “Transformasi nilai Sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Bandung” menjelaskan tentang bagaimana transformasi nilai Sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, penyelenggara pelayanan publik bahkan belum memahami dengan betul makna dari transformasi Sabilulungan kedalam pelayanan publik. Terakhir, dalam penelitian Ekalestari et al. (2022) yang berjudul “Abreviasi dan Akronim dalam Berkomunikasi oleh Pengguna Media Sosial” menjelaskan bahwa Abreviasi dan akronim adalah bentuk singkatan yang digunakan oleh pengguna media sosial untuk menghemat tulisan, menambah gaya dalam berkomunikasi, dan sebagai ciri pembeda. Hasil penelitian ini kemudian

menunjukkan bahwa Dalam penggunaannya, bentuk-bentuk ini cenderung berubah seiring perkembangan jaman dan perbedaan generasi. Oleh karena itu, bentuk abreviasi dan akronim hanya dipahami oleh sekelompok orang dengan jaman dan generasi yang sama. Jika lawan bicara tidak mengerti abreviasi dan akronim yang digunakan, maka akan mempersulit dan memperlambat pemahaman dalam berkomunikasi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada konteks penelitian yang membahas abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, kemudian ditinjau menggunakan tahap adopsi inovasi dalam *Diffusion of Innovations* karya Rogers (2003) yang meliputi lima tahapan yaitu; *knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation*.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi tahapan adopsi inovasi abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar.

II. METODE

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif deskriptif dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini dipilih karena data yang dikumpulkan di lapangan berupa kata-kata, perilaku, kalimat, dan gambar alamiah yang akan digunakan untuk menjelaskan peristiwa sosial yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, peneliti bertujuan untuk mengungkap berbagai gejala yang terdapat dalam masalah penelitian secara terurut dan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode dengan sifat naturalistik dan menggunakan pendekatan filosofis postpositivisme (Sidiq & Choiri, 2019)

sumber data dalam penelitian ini meliputi individu, dokumen, aktivitas, dan lokasi. Data primer adalah opini, persepsi, dan pemikiran yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi, serta dokumen yang menjelaskan fenomena dan gejala yang diteliti. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang tersedia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil, peneliti akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggambarkan tahapan adopsi inovasi abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi di Diskominfo Kota Makassar. Berdasarkan teori yang peneliti cantumkan pada bab ketiga, dalam *diffusion of innovations* karya Rogers (2003) menjelaskan mengenai tahapan adopsi inovasi yang kemudian peneliti gunakan untuk menjawab persoalan penelitian ini sebab dari dulu sampai sekarang, penamaan inovasi masalah menjadi hal yang sering diabaikan. Padahal nama yang diberikan pada sebuah inovasi sangat memengaruhi tingkat adopsi inovasi tersebut, serta kurangnya perhatian terhadap bagaimana inovasi dinamai berpotensi mengakibatkan masalah sosial karena persepsi terhadap sebuah inovasi dipengaruhi oleh kata yang digunakan dimana pemilihan nama aplikasi bahkan haruslah diberi perhatian khusus. Kata-kata sebagai unit pemikiran yang membentuk persepsi seseorang terhadap inovasi pasti akan memengaruhi tingkat adopsi inovasi tersebut. Dengan begitulah penamaan sebuah gagasan baru barulah bisa memiliki makna yang sesuai bagi audiens yang dituju Rogers (2003).

Tabel 4. 1

Daftar Aplikasi yang Menggunakan Abreviasi Bahasa Lokal di Kota Makassar

| No | Nama Inovasi Beserta Artinya | Informasi | Instansi | End User |
|----|------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | <i>Anrong</i> (Induk) | Superapps Kota Makassar | Diskominfo Kota Makassar | Pemerintah kota, Masyarakat |
| 2. | <i>Pakinta</i> (Kejutkan) | PAjaK TerINtegrasi & TerdigiTAlisasi, merupakan aplikasi induk pengecekan & pembayaran seluruh jenis | Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar | Pemerintah Kota, Masyarakat |

| No | Nama Inovasi Beserta Artinya | Informasi | Instansi | End User |
|-----|--|---|--|--------------------------|
| | | pajak untuk wajib pajak di Kota Makassar. | | |
| 3. | <i>Ajamma</i> (Melaporkan) | AJang Aspirasai Masyarakat MAKassar) dan e-Sosper (Pelaporan Kegiatan Sosper Anggota DPRD Kota Makassar), e-Ajamma, aplikasi merupakan sistem informasi yang memiliki peran sangat penting pada peningkatan pelayan publik khususnya pada pengaduan dan aspirasi mengenai pelayanan publik. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar | Masyarakat |
| 4. | <i>Dottoro' Ta</i> (Dokter Kita) | Layanan home care dan konsultasi kesehatan <i>online</i> | Pemerintah Kota Makassar | Masyarakat |
| 5. | <i>SipakaTallasa</i> (Saling Menyederhanakan) | Sistem Panduan Verifikasi Pendaftaran Dan Pelaporan Lembaga Kesejahteraan Sosial | Dinas Sosial Kota Makassar | Masyarakat |
| 6. | <i>Adama Bos</i> (Saya sudah ada, bos) | Aplikasi Data Penerima Bantuan Sosial | Dinas Sosial Kota Makassar | Pemerintah Kota Makassar |
| 7. | <i>Sembakota</i> (Sembako kita) | Memberikan informasi harga komoditi di 10 pasar tradisional di Kota Makassar | Dinas Perdagangan Kota Makassar | Masyarakat |
| 8. | <i>Bacce</i> (rumah ibu pintar) | <i>Balla Amma Caradde</i> (rumah ibu pintar), merupakan aplikasi komunikasi dan perekaman data bullying, kekerasan dalam rumah tangga, anak berhadapan dengan hukum, kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan dalam situasi darurat. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar | Masyarakat |
| 9. | <i>Tallasa</i> (apa adanya) | TALLASA (Tallo Integrated Smart System and Application, Untuk Memudahkan dan mempercepat pelayan ditingkat kecamatan dan kelurahan. | Kecamatan Tallo | Masyarakat |
| 10. | <i>Sikarannuang</i> (saling merindukan) | Sistem Informasi Kelurahan dan Kecamatan Panakkukang dimana website ini menyediakan akses informasi kegiatan serta pelayanan hingga aduan bagi seluruh warga Kecamatan Panakkukang | Kecamatan Panakkukang | Masyarakat |
| 11. | <i>Bawata</i> (bersama kamu) | Aplikasi Pelayanan Kecamatan Wajo Kota Makassar | Kecamatan Wajo | Masyarakat |

| No | Nama Inovasi Beserta Artinya | Informasi | Instansi | End User |
|-----|---|---|---|-----------------------------|
| 12. | <i>Siranrang</i> (Kumpulan Karang) | Sistem Informasi Manajemen Sangkarrang. Sistem informasi yang mencakup berbagai aspek Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. | Kecamatan Sangkarrang | Masyarakat |
| 13. | <i>Siporannuta</i> (saling menyenangkan) | Aplikasi pelayanan <i>online</i> Kecamatan Tamalanrea | Kecamatan Tamalanrea | Masyarakat |
| 14. | <i>Kucataki</i> (saya catat) | Pencatatan Kelahiran dan Kematian <i>Online</i> Kota Makassar | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar | Pemerintah Kota, Masyarakat |
| 15. | <i>Sijanjang</i> (saling melihat) | sistem informasi manajemen kecamatan ujung pandang, Aplikasi berisi informasi umum kecamatan ujung pandang | Kecamatan Ujung Pandang | Masyarakat |
| 16. | <i>Sipabaji</i> (saling berbaik hati) | Aplikasi pendukung pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Kota Maakssar. | Pemerintah Kota Makassar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Pemerintah Kota |
| 17. | <i>Sipakatau</i> (memanusiakan manusia) | Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kecamatan dan Kelurahan Siapakatau ini adalah aplikassi berbasis web untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Tamalate terhadap masyarakat serta sebagai bentuk peran aktif pemerintah dalam memulihkan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid 19. | Kecamatan Tamalate | Masyarakat |
| 18. | <i>Akkareso</i> (Bekerja keras) | Aplikasi ini untuk menyelesaikan permasalahan pendataan wajib retribusi yang ada dikecamatan tamalate, 1 kali akses, mulai dari pendataan wajib retribusi, pencatatan keuangan yang masuk dari hasil retribusi sampai dengan pencetakan kuitansi yang dilengkapi dengan barcodeing, selain itu camat dan lurah dapat melakukan monitoring dan evaluasi proses penarikan retribusi dilapanagan melalui handphonenya masing-masing. | Kecamatan Tamalate | Masyarakat |
| 19. | <i>Biasamata</i> (sudah terbiasa) | Biasamata berupaya menjamin ketersediaan data terkait kondisi | Dinas Kebudayaan dan | Pemerintah Kota |

| No | Nama Inovasi Beserta Artinya | Informasi | Instansi | End User |
|-----|---|--|--|-----------------------------|
| | | ketenagakerjaan bidang pariwisata secara akurat dan terkini untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata di Kota Makassar. | Pariwisata Kota Makassar | |
| 20. | <i>Upa'ta</i> (kamu sangat beruntung) | (Ujung Pandang Tanggap Aduan) Aplikasi ini untuk memberi informasi cepat ke satuan siaga bencana kecamatan ujung pandang, baik itu informasi kebakaran, pohon tumbang, banjir, dll | Kecamatan Ujung Pandang | Masyarakat |
| 21. | <i>Siap Adama'</i> (siap saya sudah hadir) | Sistem Penyimpanan Arsip Digital Kota Makassar | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Makassar | Pemerintah Kota |
| 22. | <i>Sehattami</i> (sudah sehat ya) | SEHATTAmi merupakan inovasi aplikasi data terintegrasi dengan beberapa SKPD di bidang kesehatan yang memudahkan dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan perencanaan. | Pemerintah Kota Makassar | Pemerintah Kota |
| 23. | <i>Assipa</i> (menggiurkan) | Assipa merupakan Aplikasi Induk di Dinas Ketahanan Pangan yang terdapat beberapa informasi seperti Panel Harga, Registrasi PSAT dan lainnya terkait pangan | Dinas Ketahanan Pangan | Pemerintah Kota |
| 24. | <i>Taurungka</i> (anak muda) | Pendataan sebaran pemuda di Kota Makassar, umkm pemuda dan organisasi pemuda. | Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar | Pemerintah Kota |
| 25. | <i>Sotta</i> (Sok Tahu) | Aplikasi Pelaporan Bencana Alam Kota Makassar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar | Masyarakat |
| 26. | <i>Sandro</i> (Dukun) | Aplikasi bencana dan laporan situasi terkini Kota Makassar | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar | Pemerintah Kota, Masyarakat |
| 27. | <i>Appakati'no</i> (percepat) | Aplikasi pengungsian dan dapur umum, yaitu aplikasi pendataan masyarakat penyintas bencana secara <i>online</i> | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar | Pemerintah Kota |

Diolah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, 2024.

3.1 Tahapan Adopsi

Proses pengambilan keputusan inovasi melibatkan serangkaian langkah di mana seseorang akan memutuskan dan mempertimbangkan gagasan baru. Langkah-langkah ini termasuk memperoleh pengetahuan awal tentang inovasi, membentuk sikap terhadapnya, memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolaknya, mengimplementasikan gagasan tersebut, dan akhirnya mengonfirmasi keputusan yang diambil. Dalam proses ini, individu atau organisasi harus menghadapi ketidakpastian terkait dengan kebaruan inovasi dan memutuskan apakah alternatif baru tersebut akan diterapkan dalam praktik yang sedang berlangsung. Dalam konteks penelitian ini, penulis kemudian menggunakan lima tahapan yang ada pada konsep ini untuk mengetahui tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada inovasi abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi di Diskominfo Kota Makassar. Kelima tahapan tersebut adalah:

3.1.1 Knowledge

Proses tahapan adopsi berawal dari tahapan pengetahuan yang terjadi saat seorang diperkenalkan dengan eksistensi suatu inovasi dan mendapatkan pemahaman mengenai cara kerja inovasi tersebut (Rogers, 2003). Wawancara kemudian dilakukan kepada PLT. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ibu Ismawaty Nur, S.R, M.Sc, Ph.D pada tanggal 18 Januari yang menyatakan bahwa: “Oh, itu ide yang muncul dari diskusi tim. kami melihat hal serupa di kota-kota lain dan berpikir itu bisa menjadi cara yang bagus untuk diterapkan juga disini. Keputusan ini didasarkan pada respon kami terhadap Makassar *Sombere & Smart City*, konsep kota pintar yang menggunakan *heartware* atau elemen kebudayaan untuk menggaet hati masyarakat dengan harapan bahwa mereka (masyarakat Kota Makassar) akan lebih merespons positif terhadap inovasi aplikasi dengan nama-nama yang mencerminkan identitas lokal mereka. Kalau kedepannya tidak ada persyaratan khusus sih untuk suatu aplikasi harus diberi nama pakai aksan lokal, tergantung kreativitas masing-masing saja”

Menurut informan, inovasi berbentuk penamaan aplikasi menggunakan abreviasi bahasa lokal ini muncul ketika melakukan diskusi tim, dan melihat inovasi serupa terjadi di kota-kota lain. Selain itu, konsep Makassar *Sombere' & Smart City* yang menggunakan *heartware* untuk menggaet hati masyarakat juga menjadi hal utama yang mendasari adopsi inovasi ini. Hal ini didukung oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ibu Isnaniah Nurdin, S.Sos., M.I.Kom melalui wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 23 Januari bahwa: “Awalnya kami hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tren tanpa mempertimbangkan konteks lokal secara spesifik, namun melihat penelitian yang anda lakukan kami mungkin akan mempertimbangkan hal ini dengan lebih serius kedepannya”

Menurut keterangan dari informan, inovasi ini awalnya dilakukan hanya untuk mengikuti tren tanpa mempertimbangkan konteks lokal secara spesifik. Sementara itu pendapat tambahan diberikan oleh Bapak Andi Zulkarnain, S.T selaku Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar pada wawancara tanggal 22 Januari 2024 bahwa: “Kami tidak mengadakan sesi pelatihan apapun yang mencakup pentingnya integrasi budaya lokal dalam pengembangan aplikasi karena memang kami belum memikirkannya sejauh itu. Apalagi belum ada standar penamaan dan abreviasi bahasa lokal soal penamaan inovasi aplikasi.”

Menurut keterangan beliau, dalam pengembangan aplikasi di Diskominfo Kota Makassar, mereka tidak mengadakan pelatihan apapun mengenai integrasi budaya lokal sehingga ada kecenderungan bahwa mereka belum memastikan apakah tim pengembang benar-benar memahami penamaan aplikasi menggunakan bahasa lokal atau tidak. Apalagi belum ada standar penamaan atau aturan yang meregulasi hal ini. Abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi di Diskominfo Kota Makassar belum memenuhi indikator pada dimensi *knowledge*. Tahap *knowledge* dalam proses adopsi inovasi adalah tahap di mana individu diperkenalkan dengan eksistensi inovasi dan memahami cara kerjanya. Dalam hal ini, wawancara dengan PLT. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ibu Ismawaty Nur, S.R, M.Sc, Ph.D, menunjukkan bahwa pemahaman mengenai abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi telah terjadi melalui diskusi tim berdasarkan pengamatan mereka terhadap inovasi yang sama di kota-kota lain dimana sepemahaman mereka, integrasi nilai budaya dan teknologi (*heartware*) untuk menggaet hati masyarakat yang ditekankan pada konsep Makassar *Sombere' & Smart City* menjadi dasar dari diadopsinya inovasi ini di Diskominfo Kota Makassar. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ibu Isnaniah Nurdin, S.Sos., M.I.Kom mengutarakan bahwa mereka memahami inovasi ini berdasarkan tren yang mereka lihat dari kota lain tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Ini kemudian menunjukkan kecenderungan Diskominfo Kota Makassar yang setengah-setengah dalam tahapan *knowledge* ini. Bapak Andi Zulkarnain, S.T, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar juga menegaskan bahwa secara khusus tim pengembang aplikasi di

Diskominfo Kota Makassar tidak diberikan pemahaman yang cukup dan belum memahami inovasi ini secara mendalam sehingga timbul kecenderungan bahwa Diskominfo Kota Makassar kurang serius dalam tahapan ini.

Dari wawancara dengan informan, terlihat bahwa pemahaman tentang inovasi ini cenderung belum cukup bagi Diskominfo Kota Makassar untuk memenuhi indikator pada dimensi *knowledge*. Penulis bisa mendukung bahwa belum ada pemahaman dan perhatian terhadap nilai-nilai lokal dan budaya dari Diskominfo Kota Makassar dalam menamai aplikasinya karena berdasarkan data yang penulis temukan pada tabel 4.2 Daftar Aplikasi yang Menggunakan Abreviasi Bahasa Lokal di Kota Makassar, ada banyak aplikasi yang diberi nama menggunakan abreviasi bahasa lokal tidak relevan dengan konteks atau fungsi aplikasinya itu sendiri. Contohnya aplikasi Pakinta yang berarti “kagetkan” namun secara konteks aplikasi ini merupakan aplikasi pajak terintegrasi secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan adopsi inovasi *knowledge* tidak terjadi dengan sempurna. Padahal tahap *knowledge* ini menjadi landasan penting dalam tahapan adopsi inovasi secara keseluruhan.

3.1.2 *Persuasion*

Pada tahap persuasi, seseorang akan membentuk sikap yang positif atau tidak terhadap sebuah inovasi. Tahap ini menjadikan individu lebih terlibat secara psikologis dengan inovasi dan secara aktif mencari informasi tentang ide baru tersebut. Hasil utama dari tahap ini adalah sikap yang diproyeksikan terhadap inovasi. Diasumsikan bahwa tahap ini akan mengarah pada perubahan perilaku yang berikutnya (yaitu, adopsi atau penolakan) yang sesuai dengan sikap individu (Rogers, 2003). Pada wawancara yang dilakukan kepada PLT. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ibu Ismawaty Nur, S.R, M.Sc, Ph.D pada tanggal 18 Januari, beliau menyatakan bahwa: “Saya pikir itu strategi yang cerdas. Ini memberikan sentuhan baru dan membantu aplikasi kita dikenali. Namun, saya akui ada kekhawatiran bahwa tidak semua orang akan segera paham karena kami juga tidak mencari tau apakah ini efektif atau tidak. kami memang tidak memikirkan hal ini sejauh itu.”

Menurut Ibu Ismawaty, abreviasi ini merupakan strategi yang cerdas sebagai langkah persuasif untuk membantu aplikasi lebih dikenali melalui sentuhan yang baru yakni menggunakan nama dengan abreviasi bahasa lokal, meski beliau juga mengakui bahwa ada kekhawatiran kalau tidak semua orang akan segera paham apalagi karena Diskominfo Kota Makassar belum memastikan keefektifan inovasi ini. Pandangan lain diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ibu Isnaniah Nurdin, S.Sos., M.I.Kom melalui wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 23 Januari bahwa: “Meski awalnya ada rasa skeptis, karena kami memberikan narasi yang menggambarkan manfaat jangka panjang dari abreviasi bahasa lokal dalam branding dan komunikasi kepada tim, kami tidak merasa menemui tantangan apa pun pada tim. Tim kami langsung setuju dengan ide tersebut tanpa perlu diskusi lebih lanjut. Kami mengadakan diskusi terbuka dan memperbolehkan setiap anggota tim menyampaikan pandangannya. Namun kami belum sampai pada tingkat keseriusan dimana kami akan mengundang ahli bahasa dan praktisi komunikasi untuk memberikan perspektif yang beragam mengenai hal ini.”

Informan menyatakan bahwa persuasi dilakukan melalui memberikan pandangan dari sisi internal dimana meski awalnya ada rasa skeptis dari tim komunikasi, beliau ternyata telah memberikan penjelasan secara persuasif melalui gambaran manfaat jangka panjang bagi branding dan komunikasi mereka melalui abreviasi bahasa lokal ini. Ibu Isnaniah bahkan mengadakan diskusi terbuka apabila ada pandangan lain yang ingin disampaikan oleh tim. Hal ini juga didukung dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Andi Zulkarnain, S.T selaku Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar pada wawancara tanggal 22 Januari 2024 bahwa: “Reaksi awal pengembang bervariasi. Beberapa pengembang merasa ini adalah langkah positif, sementara yang lain tidak terlalu mementingkan dan hanya mengikuti arahan ... Sebenarnya, kami tidak memiliki strategi persuasi khusus. Kami hanya berharap tim akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan, tapi sesi brainstorming untuk penamaan tetap berjalan meski tidak sedalam itu.”

Menurut informan, reaksi awal tim pengembang bervariasi dalam menanggapi abreviasi bahasa lokal untuk menamai aplikasi yang sedang mereka kembangkan menggunakan abreviasi bahasa lokal. Ada yang menunjukkan reaksi positif dan ada juga yang tak acuh. Beliau menjelaskan bahwa dalam memproyeksikan sikap persuasif kepada tim pengembang, tidak diperlukan strategi khusus. Tapi sesi bertukar pikiran tetap diakomodir kepada mereka.

Abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi di Diskominfo Kota Makassar memenuhi indikator pada dimensi *persuasion*. Tahap *persuasion* dalam proses adopsi inovasi adalah tahap di mana individu membentuk sikap positif atau negatif terhadap inovasi setelah mendapatkan pemahaman awal. Dalam hal ini, wawancara dengan PLT. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ibu

Ismawaty Nur, S.R, M.Sc, Ph.D, menganggap bahwa penamaan menggunakan abreviasi bahasa lokal ini merupakan strategi yang cerdas dan langkah persuasif kepada masyarakat untuk lebih mudah mengenali aplikasi Diskominfo Kota Makassar. Rasa optimis informan kemudian penulis anggap sebagai tanggapan positif terhadap inovasi penamaan aplikasi menggunakan abreviasi bahasa lokal pada tahapan ini. Sayangnya informan juga menunjukkan sikap negatif dari kekhawatirannya kalau tidak semua masyarakat akan paham sehingga Diskominfo Kota Makassar belum memastikan keefektifan inovasi ini. Selain itu, pandangan dari Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ibu Isnaniah Nurdin, S.Sos., M.I.Kom, juga menunjukkan bahwa terdapat upaya persuasif yang berhasil dalam tim internal. Meskipun awalnya ada rasa skeptis, namun penjelasan mengenai manfaat jangka panjang dari abreviasi dalam branding dan komunikasi berhasil meyakinkan tim untuk menerima ide tersebut tanpa perlu diskusi lebih lanjut dan ini peneliti anggap sebagai sebuah sikap positif. Proses persuasi ini juga terlihat dari reaksi beragam tim pengembang aplikasi. Meskipun ada yang merasa positif terhadap langkah tersebut, namun ada juga yang tidak terlalu peduli dan hanya mengikuti arahan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya persuasif yang beragam namun positif dalam mempengaruhi sikap individu terhadap inovasi ini.

Dengan demikian, inovasi abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi di Diskominfo Kota Makassar telah memenuhi indikator pada dimensi *persuasion* meski pada informan pertama menunjukkan reaksi yang tidak pasti terhadap inovasi ini. Pada dasarnya proses persuasi ini melibatkan upaya untuk membentuk sikap positif terhadap inovasi melalui komunikasi yang efektif mengenai manfaat dan nilai dari abreviasi bahasa lokal dalam penamaan aplikasi dan persuasi melalui komunikasi aktif hanya dilakukan oleh informan kedua dan ketiga sementara reaksi informan pertama terhadap inovasi ini hanyalah opini dan kekhawatiran pribadi semata. Tahap *persuasion* penulis anggap terpenuhi berdasarkan hasil analisis diatas.

3.1.3 *Decision*

Tahap pengambilan keputusan dalam tahapan adopsi inovasi terjadi ketika individu atau unit pengambil keputusan terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Adopsi merupakan keputusan untuk sepenuhnya menggunakan inovasi sebagai tindakan terbaik yang tersedia, sementara penolakan adalah keputusan untuk tidak mengadopsi inovasi (Rogers, 2003). Proses pengambilan keputusan inovasi juga dapat mengarah pada keputusan penolakan, dan setiap tahap dalam proses ini memiliki potensi sebagai titik penolakan. Misalnya, penolakan dapat terjadi pada tahap pengetahuan, ketika individu melupakan inovasi setelah mendapatkan pengetahuan awal, bahkan setelah sebelumnya memutuskan untuk mengadopsi. Terlepas dari hal itu, peneliti kemudian menggunakan wawancara untuk melihat bagaimana penamaan aplikasi menggunakan abreviasi bahasa lokal ini pada tahap *decision*. Pada wawancara yang dilakukan kepada PLT. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ibu Ismawaty Nur, S.R, M.Sc, Ph.D pada tanggal 18 Januari, beliau menyatakan bahwa: “Faktor utama kami memutuskan untuk menerapkan ini adalah keinginan untuk meningkatkan penerimaan publik terhadap aplikasi yang kami kembangkan. Kami ingin inovasi yang kami lakukan tidak hanya canggih secara teknologi tetapi juga dekat dengan masyarakat. Meskipun demikian, kami belum terlalu memastikan bahwa ini tidak akan menyulitkan pengguna yang tidak familiar dengan bahasa lokal apalagi kami juga belum memastikan apakah masyarakat membutuhkan inovasi ini atau tidak”

Informan menjelaskan mengenai faktor yang paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam abreviasi bahasa lokal ini. Keinginan untuk meningkatkan penerimaan publik terhadap aplikasi baru merupakan faktor utama meski belum memastikan apakah ini akan menyulitkan pengguna karena Diskominfo Kota Makassar juga belum memastikan apakah masyarakat membutuhkan inovasi ini atau tidak. Selain itu beliau juga menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan ini pada wawancara yang sama dengan menyatakan bahwa: “Kami memulai dengan melakukan jajak pendapat secara internal dengan melibatkan tim pengembang dalam diskusi mengenai abreviasi ini. Awalnya memang beberapa anggota tim masih skeptis tentang efektivitas abreviasi ini dan mempertanyakan apakah pengguna akan mengerti. Setelah itu, kami mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, untuk memastikan kesepakatan apakah diterima atau tidak”

Beliau menjelaskan bahwa proses pengambilannya dimulai dari jajak pendapat secara internal dengan melibatkan beberapa pihak, lalu dikonfirmasi ke pimpinan apakah disetujui atau tidak. Di sisi lain, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ibu Isnaniah Nurdin, S.Sos., M.I.Kom melalui wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 23 Januari juga memberikan pandangan bahwa: “Tidak ada perdebatan yang serius. Kami hanya mengambil keputusan berdasarkan intuisi tanpa pertimbangan

yang matang. Pada beberapa kasus saya tidak terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Saya hanya mengikuti apa yang diputuskan oleh atasan saya. Namun apabila pengembangan termasuk penamaan inovasi aplikasi baru sepenuhnya diberikan kepada kami, saya biasanya berperan sebagai fasilitator dalam diskusi tim. Saya memastikan bahwa semua sudut pandang didengar dan bahwa keputusan diambil secara kolektif.”

Menurut Ibu Isnaniah, dalam pengambilan keputusan dalam menamai aplikasi menggunakan abreviasi bahasa lokal, tidak ada perdebatan yang serius karena nama yang digunakan pun tidak dipertimbangkan dengan matang dan seserius itu. Ibu Isnaniah biasanya tidak terlibat aktif dan hanya berperan sebagai fasilitator diskusi apabila ada aplikasi baru yang ingin dinamai. Sedangkan Bapak Andi Zulkarnain, S.T selaku Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar pada wawancara tanggal 22 Januari 2024 memberikan pandangan yang lebih luas dengan mengatakan bahwa: “Saya terlibat secara aktif dalam diskusi penamaan menggunakan abreviasi. Meski pada prosesnya memang belum ada best practices soal hal ini. Tapi biasanya sih nama suatu aplikasi akan ditentukan paling akhir ketika aplikasinya sudah diajukan ke pimpinan dulu, baru launching kalau cocok. Kami tidak memiliki kriteria khusus. Keputusan ini lebih berdasarkan intuisi daripada analisis yang mendalam.”

Menurut beliau, pengambilan keputusan pada abreviasi bahasa lokal ini belum memiliki *best practice* untuk dipedomani sehingga menunjukkan kecenderungan dimana dalam proses pengambilan keputusannya, tidak ditanggapi seserius itu dan hanya berdasarkan intuisi tanpa analisis mendalam. Namun secara proses, aplikasi akan dinamai apabila aplikasinya telah selesai dikembangkan, kemudian akan diajukan ke pimpinan. Apabila disetujui, baru aplikasinya akan diluncurkan.

Abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar memenuhi indikator pada dimensi *decision* dalam tahapan adopsi inovasi. *Decision* dalam tahapan adopsi inovasi terjadi ketika individu atau unit pengambil keputusan terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Dalam hal ini, terdapat penjelasan bahwa melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi internal dan melakukan jajak pendapat, pertemuan dengan pemangku kepentingan kemudian dilakukan untuk mencapai kesepakatan adopsi nama aplikasi yang menggunakan abreviasi bahasa lokal. Dalam tahap *decision*, Ibu Isnaniah sebagai orang memfasilitasi tahapan adopsi inovasi ini ketika diberi tanggung jawab penuh dalam pengembangan aplikasi juga menyatakan bahwa tidak ada perdebatan serius dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan saat menamai aplikasi dengan abreviasi bahasa lokal. Bapak Zulkarnain juga menegaskan bahwa memang belum ada *best practice* dari inovasi ini sehingga pengambilan keputusan cenderung tidak serius dan tanpa dipikirkan secara mendalam. Tapi bagaimanapun proses berpikirnya, pada dasarnya proses *decision* tetap terjadi sehingga inovasi penamaan aplikasi menggunakan abreviasi bahasa lokal di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dapat dikatakan memenuhi indikator pada dimensi *decision* dalam tahapan adopsi inovasi.

3.1.4 Implementation

Implementasi terjadi ketika individu atau unit pengambil keputusan menggunakan inovasi. Pada akhirnya, ada titik di mana inovasi menjadi terinstitusionalisasi sebagai bagian teratur dari keseharian organisasi dan dianggap sebagai akhir dari tahap implementasi. Ini juga dapat mewakili akhir dari proses pengambilan keputusan inovasi bagi banyak orang (Rogers, 2003). Namun, bagi orang lain, tahap konfirmasi kelima bisa terjadi. Pada wawancara yang dilakukan kepada PLT. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ibu Ismawaty Nur, S.R, M.Sc, Ph.D pada tanggal 18 Januari, beliau menyatakan bahwa: “Kami mulai dengan sosialisasi internal, brainstorming, mengajukan ke pimpinan, lalu launching. Tentu saja kami akui, ada momen-momen ketika abreviasi tidak digunakan secara konsisten. Ini bisa menjadi bahan evaluasi kami.”

Menurut informan, tahap implementasi dimulai dengan sosialisasi internal, brainstorming, pengajuan ke pimpinan, lalu peluncuran aplikasi. Beliau juga mengatakan bahwa abreviasi bahasa lokal ini tidak digunakan secara konsisten sehingga menunjukkan kecenderungan tahap implementasi yang tidak sempurna dan dipertimbangkan untuk dievaluasi. Di sisi lain Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ibu Isnaniah Nurdin, S.Sos., M.I.Kom melalui wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 23 Januari juga memberikan pandangan bahwa: “Sejujurnya kalau persoalan penamaan, kami tidak mengalami kendala apa pun. Implementasinya berjalan sangat mulus tanpa ada hambatan karena kami lebih berfokus pada hal yang lebih teknis. Kami juga tidak melakukan pemantauan khusus. Kami asumsikan bahwa publik akan menerima apa pun yang kami lakukan termasuk abreviasi bahasa lokal pada penamaan inovasi aplikasi yang sudah ada. Mungkin ini yang masih jadi kekurangan.”

Menurut informan, dalam pengimplementasian abreviasi bahasa lokal ini, tidak ditemukan adanya hambatan sama sekali. Selain itu informasi dari beliau juga menunjukkan kecenderungan bahwa Diskominfo Kota Makassar mengasumsikan bahwa abreviasi bahasa lokal ini akan diterima begitu saja oleh publik.

Bapak Andi Zulkarnain, S.T selaku Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar pada wawancara tanggal 22 Januari 2024 juga menambahkan bahwa: “Sebenarnya, kami tidak memiliki rencana implementasi yang jelas. Kami hanya mengandalkan sesi diskusi singkat untuk praktiknya. Tidak ada sistem pelaporan yang khusus soal ini karena secara teknis memang kami tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan penamaan ini, dan sebenarnya tidak setiap aplikasi juga kami beri nama pakai bahasa makassar”

Menurut Pak Zulkarnain, tidak ada rencana yang jelas dalam mengimplementasikan ide ini selain diskusi singkat yang dilakukan, apalagi karena dalam praktiknya tidak semua aplikasi baru akan dinamai menggunakan Bahasa Makassar.

Abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi di Diskominfo Kota Makassar memperlihatkan bahwa implementasi inovasi ini telah mencapai tahap yang cukup signifikan. Implementasi adalah tahap di mana individu atau unit pengambil keputusan mulai menggunakan inovasi secara aktif. Dalam konteks ini, inovasi ini telah terinstitusionalisasi sebagai bagian rutin dari aktivitas organisasi, menunjukkan bahwa inovasi ini telah diterima di Diskominfo Kota Makassar.

Menurut informan, pada dasarnya proses implementasi inovasi ini dimulai dari sosialisasi internal bahwa sebuah aplikasi akan dinamai menggunakan abreviasi bahasa lokal, kemudian dilakukan brainstorming mengenai nama yang cocok, lalu nama beserta aplikasinya akan diajukan ke pimpinan dan apabila cocok, barulah aplikasi diluncurkan. Menurut keterangan Ibu Isnaniah inovasi ini tidak mengalami kendala apapun dalam implementasinya.

Sayangnya informan juga mengemukakan bahwa masih ada momen dimana tidak selamanya aplikasi diberi nama menggunakan abreviasi bahasa lokal yang kemudian penulis anggap sebagai bentuk inkonsistensi Diskominfo Kota Makassar dalam mengimplementasikan inovasi ini. Memang tahap implementasi telah terjadi, tapi hal ini berakibat pada tidak sempurnanya tahapan ini dalam tahap adopsi inovasi.

3.1.5 Confirmation

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keputusan untuk mengadopsi atau menolak (implementasi) inovasi baru seringkali bukan tahap akhir dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Pada tahap konfirmasi, ada dua hal yang ingin dicegah untuk terjadi yaitu penggantian dan ketidakpuasan. Penggantian adalah keputusan untuk menolak ide dengan tujuan mengadopsi ide yang lebih baik yang menggantikannya. Gelombang inovasi yang konstan dapat terjadi di mana setiap gagasan baru menggantikan praktik yang sudah ada yang merupakan inovasi pada masanya. Ketidakpuasan adalah keputusan untuk menolak ide karena ketidakpuasan terhadap kinerjanya. Ketidakpuasan ini mungkin terjadi karena inovasi tidak sesuai untuk individu dan tidak memberikan keuntungan relatif yang dirasakan dibandingkan dengan alternatif lainnya (Rogers, 2003). Pada wawancara yang dilakukan kepada PLT. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ibu Ismawaty Nur, S.R, M.Sc, Ph.D pada tanggal 18 Januari, beliau menyatakan bahwa: “Ini adalah proses belajar bagi kami, dan kami siap membuat penyesuaian jika diperlukan apalagi jika itu berhubungan dengan nama yang kurang pas.” Dari informasi diatas informan menunjukkan kesiapan untuk membuat penyesuaian terhadap aplikasi yang telah dinamai menggunakan abreviasi bahasa lokal di Diskominfo Kota Makassar.

Hal ini juga didukung oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Ibu Isnaniah Nurdin, S.Sos., M.I.Kom melalui wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 23 Januari yang memberikan pandangan bahwa: “Kalau soal jangka panjang tentu kami akan terus menggunakan bahasa lokal pada penamaan inovasi aplikasi kedepannya, selama Kota Makassar masih menggunakan konsep *Sombere' & Smart City*”

Menurut informan, abreviasi bahasa lokal ini akan digunakan dalam jangka panjang untuk menamai aplikasi Diskominfo Kota Makassar selama Kota Makassar itu sendiri masih menggunakan konsep *Sombere' & Smart City*.

Bapak Andi Zulkarnain, S.T selaku Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar pada wawancara tanggal 22 Januari 2024 juga menambahkan bahwa: “Kami mengambil pendekatan responsif. Jika ada masalah, kami segera melakukan review dan mengambil tindakan korektif. Sejauh ini belum ada masalah atau protes soal penamaan baik itu dari pimpinan

maupun masyarakat” Beliau mengungkapkan bahwa jika ada koreksi dari pimpinan atau protes dari pihak manapun soal penamaan ini, maka Diskominfo Kota Makassar siap mengambil tindakan responsif. Abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi Diskominfo Kota Makassar telah memenuhi indikator dari dimensi konfirmasi dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Konfirmasi merupakan tahap akhir dalam proses pengambilan keputusan inovasi yang melibatkan dua hal utama, yaitu penggantian dan ketidakpuasan. Penggantian terjadi ketika suatu ide atau inovasi baru menggantikan praktik yang sudah ada, sedangkan ketidakpuasan terjadi ketika inovasi tidak memberikan keuntungan relatif yang dirasakan dibandingkan dengan alternatif lainnya.

Dalam konteks abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi, konfirmasi terjadi ketika keputusan untuk mengadopsi inovasi tersebut telah dilakukan dan dilakukan evaluasi terhadap keputusan tersebut. Dalam hal ini, konfirmasi dapat terjadi setelah implementasi inovasi, di mana inovasi tersebut menjadi terinstitusionalisasi pada suatu organisasi. Proses konfirmasi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil untuk mengadopsi inovasi abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi telah tepat dan memberikan nilai tambah yang diharapkan.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik memang menyatakan bahwa sepanjang Kota Makassar masih menggunakan konsep *Sombere' & Smart City*, inovasi penamaan aplikasi menggunakan bahasa lokal dicanangkan akan digunakan dalam jangka panjang. Namun dalam wawancara dengan PLT. Kepala Dinas dan Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar terungkap bahwa Diskominfo Kota Makassar juga mengambil pendekatan responsif dengan siap melakukan penyesuaian terhadap aplikasi yang telah dinamai menggunakan abreviasi bahasa lokal. Respon ini menunjukkan kemungkinan digantikannya inovasi ini dengan inovasi sebelumnya. Dalam artian aplikasi yang dinamai menggunakan abreviasi bahasa lokal akan siap diganti namanya baik itu tidak menggunakan bahasa lokal lagi atau diganti dengan bahasa lokal lain, apabila ditemukan masalah dengan inovasi ini kedepannya. Berdasarkan hal diatas, tahap *confirmation* dalam tahap adopsi inovasi ini sangat fleksibel tergantung apa yang kemudian akan terjadi dilapangan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Inovasi penamaan aplikasi menggunakan abreviasi bahasa lokal di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar muncul dari diskusi tim yang melihat fenomena serupa pada pemerintah daerah kota lain dengan harapan bahwa masyarakat akan merespon positif terhadap inovasi aplikasi yang ada karena mencerminkan identitas lokal masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, inovasi ini belum memiliki standar penamaan yang jelas, belum memastikan apakah tim pengembang memahami penamaan aplikasi menggunakan abreviasi bahasa lokal atau tidak, dan belum memastikan keefektifannya. Selanjutnya, Diskominfo Kota Makassar tidak menemukan tantangan apapun atau strategi khusus. Inovasi ini diputuskan untuk digunakan karena dorongan untuk meningkatkan penerimaan publik terhadap aplikasi yang dikembangkan meski belum memastikan apakah masyarakat membutuhkan inovasi ini atau tidak. Inovasi ini dilakukan melalui proses sosialisasi internal, brainstorming, pengajuan ke pimpinan, kemudian di-*launching* bersamaan dengan aplikasi terkait. Diskominfo Kota Makassar mengambil pendekatan responsif dengan siap melakukan penyesuaian terhadap aplikasi yang telah dinamai menggunakan abreviasi bahasa lokal. Respon ini menunjukkan kemungkinan digantikannya inovasi ini dengan inovasi sebelumnya. Dalam artian aplikasi yang dinamai menggunakan abreviasi bahasa lokal akan siap diganti namanya menjadi tidak menggunakan bahasa lokal lagi atau diganti dengan bahasa lokal lain, apabila ditemukan masalah dengan inovasi ini kedepannya sehingga inovasi ini sangat fleksibel tergantung apa yang kemudian akan terjadi dilapangan.

IV. KESIMPULAN

Kota Makassar, sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, telah mengembangkan konsep *Sombere' & Smart City* dengan pendekatan unik yang menggabungkan teknologi dan nilai-nilai lokal. Hal ini kemudian diwujudkan Diskominfo Kota Makassar salah satunya melalui penamaan aplikasi yang menggunakan abreviasi bahasa lokal. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan diatas, penulis kemudian menyimpulkan bahwa pemahaman Diskominfo Kota Makassar terhadap inovasi ini belum memenuhi indikator pada tahap *knowledge* karena Diskominfo Kota Makassar kurang serius dalam memahami inovasi ini. Adopsi inovasi yang hanya bermodalkan ikut-ikutan dengan kota lain tanpa pertimbangan dan pemahaman yang mendalam menyebabkan aplikasi yang diberi nama menggunakan abreviasi bahasa lokal kerap tidak relevan dengan konteks dan fungsi aplikasi tersebut.

Inovasi abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi di Diskominfo Kota Makassar telah memenuhi indikator pada dimensi *persuasion* meski pada informan pertama menunjukkan reaksi yang tidak pasti terhadap inovasi ini. Pada dasarnya proses persuasi ini melibatkan upaya untuk membentuk sikap positif

terhadap inovasi melalui komunikasi yang efektif mengenai manfaat dan nilai dari abreviasi bahasa lokal dalam penamaan aplikasi dan persuasi melalui komunikasi aktif hanya dilakukan oleh informan kedua dan ketiga sementara reaksi informan pertama terhadap inovasi ini hanyalah opini dan kekhawatiran pribadi semata. Tahap *persuasion* penulis anggap terpenuhi berdasarkan hasil analisis diatas.

Abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar memenuhi indikator pada dimensi *decision* karena melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan dan sesi brainstorming untuk penamaan aplikasi, terlihat bahwa proses pengambilan keputusan telah dilakukan bahkan secara kolaboratif dan melibatkan berbagai pihak terkait dan memutuskan untuk menggunakan inovasi ini meski proses berpikirnya belum mendalam karena belum inovasi ini belum memiliki *best practice* maupun regulasi yang mengatur.

Abreviasi bahasa lokal pada penamaan aplikasi di Diskominfo Kota Makassar memperlihatkan bahwa implementasi inovasi ini telah mencapai tahap yang cukup signifikan. Pada dasarnya proses implementasi inovasi ini dimulai dari sosialisasi internal bahwa sebuah aplikasi akan dinamai menggunakan abreviasi bahasa lokal, kemudian dilakukan brainstorming mengenai nama yang cocok, lalu nama beserta aplikasinya akan diajukan ke pimpinan dan apabila cocok, barulah aplikasi diluncurkan. Sayangnya masih ada momen dimana tidak selamanya aplikasi diberi nama menggunakan abreviasi bahasa lokal yang kemudian penulis anggap sebagai bentuk inkonsistensi Diskominfo Kota Makassar dalam mengimplementasikan inovasi ini. Memang tahap implementasi telah terjadi, tapi hal ini berakibat pada tidak sempurnanya tahapan ini dalam tahap adopsi inovasi.

Tahap *confirmation* dalam tahap adopsi inovasi ini sangat fleksibel tergantung apa yang kemudian akan terjadi dilapangan. Penulis menyimpulkan demikian sebab meski telah memenuhi indikator dari dimensi konfirmasi karena Diskominfo Kota Makassar berencana untuk terus menggunakan inovasi abreviasi bahasa lokal ini untuk menamai aplikasi mereka, informan menunjukkan respon kemungkinan digantikannya inovasi ini dengan inovasi sebelumnya. Dalam artian aplikasi yang dinamai menggunakan abreviasi bahasa lokal akan siap diganti namanya baik itu tidak menggunakan bahasa lokal lagi atau diganti dengan bahasa lokal lain, apabila ditemukan masalah dengan inovasi ini kedepannya.

Secara keseluruhan, meski inovasi ini telah diadopsi oleh Diskominfo Kota Makassar, inovasi ini tidak melalui tahapan adopsi inovasi dengan sempurna. Inovasi ini gagal pada tahap *knowledge* dimana kurangnya pemahaman membuat eksekusi nama aplikasi jadi tidak sesuai dengan konteksnya. Tahap implementasi juga belum maksimal karena masih adanya aplikasi yang tidak dinamai menggunakan abreviasi bahasa lokal yang kemudian memengaruhi hasil dari tahap konfirmasi yang menjadi fleksibel tergantung kondisi dilapangan, dalam artian aplikasi yang dinamai menggunakan abreviasi bahasa lokal akan siap diganti namanya baik itu tidak menggunakan bahasa lokal lagi atau diganti dengan bahasa lokal lain, apabila ditemukan masalah dengan inovasi ini kedepannya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai kecepatan adopsi inovasi atau dampak inovasi ini terhadap penerimaan masyarakat pada aplikasi yang diberi nama abreviasi bahasa lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahad, M. P. Y., & Adhityo, N. B. (2023). Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 13.
- Amalia, E. (2019). Tantangan dan Isu-Isu E-Government Indonesia Dilihat dari Layanan untuk Masyarakat. *Jurnal Masyarakat Informatika Unjani*, Vol. 2.
- Anugrah, Z., Zakaria, S., & Darmawan, I. (2022). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) di Kota Bekasi Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, Vol. 2.

- Budiana, H., Bajari, A., & Mulyawan, R. (2020). Transformasi nilai Sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 8.
- Derin, T., Deliani, S., Fauziah, N., Afifah, N., & Hamuddin, B. (2019). Indonesians' Tendency to Refer Abbreviation as Acronym: Types of Abbreviation as Word Formation Process. *Globish (An English-Indonesian Journal for English, Education and Culture)*, Vol. 8.
- Ekalestari, S., Barus, E., Hasibuan, A., & Ananda, T. (2022). Penggunaan Abreviasi dan Akronim dalam Berkomunikasi oleh Pengguna Media Sosial. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 5.
- Fernandes, S. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. *Bandung, Alfabeta*.
- Humas MENPANRB. (2022, December 14). *Akselerasi Digitalisasi Pelayanan Publik melalui MPP Digital*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-digitalisasi-pelayanan-publik-melalui-mpp-digital>
- KemenPANRB. (2023). *Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2023*. SINOVIK. <https://sinovik.menpan.go.id>
- Kridalaksana. (2010). *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lan, T. (2017). Memahami Konsep Etnisitas di Perkotaan: Politik Inter-ruang di Kota Multikultural. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, Vol. 19(3).
- Noor, E., Ramly, & Saleh. (2023). Pola Pemakaian Bahasa Mahasiswa Asal Bone di Makassar (Kajian Sociolinguistik). *Titik Dua: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, Vol. 2.
- Nuraeni, & Tri, S. (2017). *Abreviasi Dalam Menu Makanan dan Minuman di Kota Semarang: Suatu Kajian Morfologis*. Universitas Diponegoro.
- Ragam, R. (2021). Pemakaian Akronim di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. *Diksi*, Vol. 29.
- Rizkinaswara, L. (2020, June 3). *Urgensi Literasi Digital bagi Masa Depan Ruang Digital Indonesia*. Ditjen Aptika. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/urgensi-literasi-digital-bagi-masa-depan-ruang-digital-indonesia/>
- Rogers, E. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. CV. Nata Karya .
- Tim DetikSulsel. (2022, March 16). *Danny Terima Usulan 108 Aplikasi Layanan Publik untuk Makassar Metaverse*. DetikSulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5986795/danny-terima-usulan-108-aplikasi-layanan-publik-untuk-makassar-metaverse>
- Wahyuni, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Musamus Journal of Public Administration*, Vol. 5.